



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.206, 2022

LKPP. Kelas Jabatan. Pencabutan.

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penetapan kelas jabatan berdasarkan validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta ditetapkannya kelas jabatan untuk jabatan fungsional oleh instansi pembina, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai kelas jabatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa penetapan kelas jabatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan beberapa surat, terakhir dengan Surat Nomor: B/986/M.SM.04.00/2021 perihal Persetujuan Penetapan

Perubahan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 09 September 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

- (1) Kelas Jabatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga ini yaitu untuk:
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 2. Jabatan Administrasi; dan
 3. Jabatan Fungsional.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Tunjangan Kinerja untuk setiap Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dibayarkan terhitung sejak persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikeluarkan.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Lembaga ini tidak berlaku untuk jabatan fungsional hasil penyetaraan.
- (2) Kelas Jabatan untuk Jabatan fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kelas jabatan pada Jabatan Administrasi sebelumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	Sekretaris Utama	16
2	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
3	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15
4	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum	15
5	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	16
6	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	15
7	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	15
8	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	15
9	Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	16
10	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	15
11	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	15
12	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
13	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	16
14	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	15
15	Direktur Sertifikasi Profesi	15
16	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	16
17	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	15
18	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	15
19	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	15
20	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	15
21	Inspektur	15

B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Jabatan Administrator		
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara	12
2	Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga	12
Jabatan Pengawas		
1	Kepala Subbagian Protokol dan Rumah Tangga	9
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
Jabatan Pelaksana		
1	Analisis Akreditasi Lembaga Diklat	7
2	Analisis Barang Milik Negara	7
3	Analisis Berkas Sengketa	7
4	Analisis Data dan Informasi	7
5	Analisis Diklat	7
6	Analisis Hukum	7
7	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	7
8	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	7
9	Analisis Kerjasama Diklat	7
10	Analisis Kinerja	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
11	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
12	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
13	Analisis Perencanaan	7
14	Analisis Perencanaan Anggaran	7
15	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7
16	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
17	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
18	Analisis Permasalahan Hukum	7
19	Analisis Protokol	7
20	Analisis Satuan Pengawas Internal	7
21	Analisis Sistem Informasi	7
22	Analisis Tata Usaha	7
23	Bendahara	7
24	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
25	Penelaah Pengembangan Usaha	7
26	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
27	Ajudan	6
28	Pengadministrasi Perlengkapan	6
29	Pengadministrasi Sertifikasi	6
30	Pengadministrasi Umum	6
31	Pengelola Barang Milik Negara (BMN)	6
32	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6
33	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa	6
34	Pengelola Keuangan	6
35	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6
36	Pengelola Sertifikasi	6
37	Pengelola Situs/Web	6
38	Pengelola Teknologi Informasi	6
39	Pranata Barang dan Jasa	6
40	Sekretaris	6
41	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
42	Verifikator Anggaran	6
43	Verifikator Keuangan	6

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
44	Pengadministrasi Keuangan	5
45	Pengadministrasi Layanan Pengadaan secara Elektronik	5
46	Pengemudi	3

C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Hukum Madya	11
2.	Analisis Hukum Muda	9
3.	Analisis Hukum Pertama	8
4.	Analisis Kebijakan Madya	12
5.	Analisis Kebijakan Muda	10
6.	Analisis Kebijakan Pertama	8
7.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Madya	12
8.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	10
9.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	8
10.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Madya	12
11.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Muda	10
12.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Pertama	8
13.	Arsiparis Madya	11
14.	Arsiparis Muda	9
15.	Arsiparis Pertama	8
16.	Arsiparis Penyelia	8
17.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
18.	Arsiparis Pelaksana	6
19.	Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Madya	12
20.	Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Muda	10
21.	Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
22.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
23.	Penata Laksana Barang Mahir	8
24.	Penata Laksana Barang Terampil	7
25.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12
26.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10
27.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
28.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	12
29.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	10
30.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	8
31.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
32.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
33.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
34.	Perencana Madya	11
35.	Perencana Muda	9
36.	Perencana Pertama	8
37.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
38.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
39.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
40.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Penyelia	8
41.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Pelaksana Lanjutan	7
42.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Pelaksana	6
43.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
44.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
45.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
46.	Pranata Komputer Utama	13
47.	Pranata Komputer Madya	11
48.	Pranata Komputer Muda	9
49.	Pranata Komputer Pertama	8
50.	Pranata Komputer Penyelia	8
51.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
52.	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6
53.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
54.	Pustakawan Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
55.	Sandiman Madya	12
56.	Sandiman Muda	10
57.	Sandiman Pertama	8
58.	Statistisi Madya	11
59.	Statistisi Muda	9
60.	Statistisi Pertama	8
61.	Manggala Informatika Madya	12
62.	Manggala Informatika Muda	10
63.	Manggala Informatika Pertama	8
64.	Widyaiswara Utama	13
65.	Widyaiswara Madya	11
66.	Widyaiswara Muda	9
67.	Widyaiswara Pertama	8
68.	Auditor Utama	13
69.	Auditor Madya	11
70.	Auditor Muda	9
71.	Auditor Pertama	8

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

ABDULLAH AZWAR ANAS